

LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN

Analisis Pengawasan Bangdal (Bidang Pengembangan dan Pengendalian)

Pendapatan Daerah di Kantor BPPRD SUMUT

Oleh :

Dosma Sny Sijabat

178510030



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN

Analisis Pengawasan Bangdal (Bidang Pengembangan dan Pengendalian) Pendapatan Daerah
di Kantor BPPRD SUMUT

Oleh :

Dosma Sny Sijabat

178510030



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Angkatan 2017 Universitas Medan Area
Analisis Pengawasan Bangdal (Bidang Pengembangan dan Pengendalian)
Pendapatan Daerah di Kantor BPPRD SUMUT.

Medan, 13 Agustus 2020

Mengetahui :

An. Kepala Badan

Sekretaris

u/b. Kasubbag Umum Bangdal

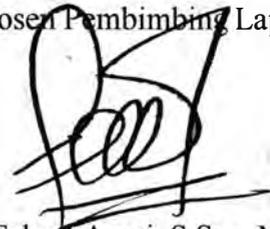
Pembimbing KKL



Diana Saragih

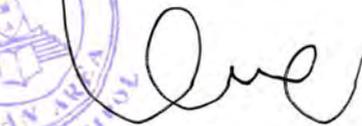
NIP: 197306091997032005

Dosen Pembimbing Lapangan



Fahrul Azmi, S.Sos, M.AP

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Evi Yunita Kurniati, S.Sos, M.IP

IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Dosma Saida Novi Yanti Sijabat
Tempat/Tanggal Lahir : 22 November 1998
Npm : 178510030
Prody : Ilmu Pemerintahan
Kampus : Kampus 1
Angkatan : 2017
Shif : Reguler

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan membuat laporan kegiatan KKL yang berjudul “ ANALISIS PENGAWASAN BAGDAL (BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN) PENDAPATAN DAERAH DI KABAN BPPRD SUMUT ”.

Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman dan ilmu yang penulis peroleh selama melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kaban BPPRD PROV SUMUT. Penulis menyadari bahwa terlaksananya kegiatan PKL dan Penulisan Laporan KKL ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr. Dadan ramdan,M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Ibuk Evi Yunita Kurniati,S.Sos,M.Ip selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area
4. Bapak Fahrul Azmi, S.Sos,M.AP selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama melaksanakan kegiatan KKL dan dalam penulisan laporan.
5. Bapak Riswan, SE selaku kepala badan (KABAN) BPPRD SUMUT
6. Ibu Diana Saragih selaku pembina Kabid PKL yang telah memberikan arahan selama KKL.
7. Rekan rekan satu tim KKL saya, Ayu Situmeang, Isak Pandiangan, Fitri Gultom, Gembira Rambe dan Juga teman-teman IP 2017 yang telah memberikan motivasi sehingga sehingga KKL ini dapat selesai.

Adapun harapan penulis agar laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis Khususnya laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, 13 agustus 2020

Penulis

Dosma Sny Sijabat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
IDENTITAS MAHASISWA	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang Kuliah Kerja Lapangan	1
1. 2 Tujuan Kkl.....	2
1. 3 Manfaat Kkl.....	2
1. 4 Metode Penulisan	2
BAB II KAJIAN TEORI	
2. 1 Defenisi Pengawasan.....	4
2. 2 Defenisi BANGDAL (Bidang Pengembangan dan Pengendalian)	6
2. 3 Defenisi Pendapatan Daerah.....	7
BAB III DESKRIPSI LOKASI	
3. 1 Sejarah singkat KANTOR BPPRD SUMUT	8
3. 2 Struktur Organisasi	9
3. 3 Fasilitas di Kantor Bpprd Sumut	13
BAB IV PEMBAHASAN	
4. 1 Tugas Dan Fungsi BANGDAL (Bidang Pengembangan dan Pengendalian)	14
4. 2 Kendala Dalam Penerapan Pengawasan di Bangdal	15
4. 3 Dampak dari Keterlambatan BANGDAL Dalam Menjalankan Tugas	15
BAB V PENUTUP	
5. 1 Kesimpulan.....	16
5. 2 Saran.....	16
Daftar Pustaka	17
UNIVERSITAS MEDAN AREA	
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

BABI

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Kuliah Kerja Lapangan

Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mendidik anak bangsa menjadi pelaku dalam dunia pembangunan di masa mendatang. Namun adanya berbagai keterbatasan dari Perguruan Tinggi tersebut menjadikan hanya memprioritaskan pengetahuan teori dan sedikit keterampilan dalam proses mengajar. Untuk melengkapinya itu, maka mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Praktek Kerja Lapangan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan 90 sks dengan jumlah IPK minimal 2,5 jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Mata Kuliah KKL memiliki bobot 3 sks dan Mata Kuliah ini merupakan alat untuk menjembatani penerapan teoritis di bangku perkuliahan dengan kondisi pekerjaan yang terjadi di lapangan. Mata kuliah ini juga membantu menambah pengetahuan dan wawasan yang tidak diterima mahasiswa dalam proses pembelajaran di dalam kampus. Dan di harapkan mahasiswa mampu memahami pengetahuan teori yang didapat selama perkuliahan serta menerapkannya dalam dunia pekerjaan. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di lapangan dilakukan dalam 1 bulan, dalam waktu 8 jam/sehari, dan jadwalnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan jam kerja.

Di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara terdapat Susunan organisasi, salah satu susunan organisasi di kantor Bpprd yaitu BANGDAL (Bidang Pengembangan dan Pengendalian) , Oleh Karena itu dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini penulis ingin mengetahui bagaimana, 'ANALISIS PENGAWASAN BAGDAL (BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN) PENDAPATAN DAERAH DI KANTOR BPPRD SUMUT ' Sesuai dengan yang diamati selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di kantor tersebut sehingga mahasiswa mampu memiliki ilmu dalam bidang teori dan pengalaman dalam dunia kerja yang sebenarnya nantinya.

Adapun alasan mengapa memilih judul ini, dikarenakan saya ditempatkan di bagian BANGDAL (Bidang pengembangan dan Pengendalian) dan belum ada laporan KKL yang berjudul demikian. Penulis hendak memfokuskan kepada pelaksanaan kerja, fungsi, dan kendala.

Proses pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang dilaksanakan di kantor Bpprd provinsi Sumatra utara, berlokasi di Jln. Serbaguna No.10 Medan Helvetia, Medan Kota, Kota Medan, Sumatra Utara .

1. 2 Tujuan Kkl

Tujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan Di Kantor Bpprd Sumut sebagai berikut :

1. Membekali dengan pengalaman yang sebenarnya dalam dunia kerja sebagai persiapan penyesuaian diri dengan dunia kerja dan masyarakat.
2. Meningkatkan keterampilan yang diperoleh dari latihan praktek di kampus.
3. Untuk mengetahui struktur organisasi di kantor Bpprd Sumut tersebut.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Bangdal di Kantor Bpprd Sumut.

1. 3 Manfaat Kkl

Adapun manfaat dari pelaksanaan kuliah kerja lapangan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah di kantor bpprd sumut sebagai berikut :

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan diluar lingkungan kampus yang berhubungan dengan program studi yang dipilih.
2. Untuk menambah pengalaman sebelum terjun kemasyarakat atau dunia kerja.
3. Menambah pengetahuan tentang kegiatan kegiatan di bangdal di kantor bpprd.

1. 4 Metode Penulisan

Adapun metode penulisan data KKL sebagai berikut :

1. 5.1. Sumber data

Data-data yang di ambil dalam laporan ini bersumber dari:

1. Lingkungan sekitar tempat KKL
2. Dokumentasi (data-data) dan arsip surat di kantor Bpprd sumut.
3. Berdasarkan pengalaman dari karyawan.
4. Berdasarkan kumpulan data-data yang ada di internet.

1. 5.2. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Teknik Observasi atau Pengamatan Lapangan

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek pengamatan dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan laporan tugas akhir yang akan penulis sampaikan, sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat. Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati situasi dan kondisi dalam kegiatan kerja di suatu perusahaan atau industri .

2) Teknik Interview atau Wawancara

Adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Teknik ini penulis menggunakan untuk wawancara dengan pimpinan dan karyawan kantor untuk mengetahui bagaimana suatu sistem kinerja kantor tersebut.

3) Teknik Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi serta benda-benda yang akan memberikan bermacam-macam keterangan penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data tentang kondisi suatu perusahaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2. 1 Defenisi Pengawasan

Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting didalam organisasi, karena tidak bisa terlepas dari masalah ketidaktertiban, penilaian, tujuan dari organisasi tersebut. Harold Koontz dan Cyril O'Donneldalam Lubis (1985) menyatakan bahwa pengawasan adalah : "penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan". Definisi lain menurut Handyaningrat (1988) adalah : "pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan" Lebih lanjut ditegaskan oleh Handyaningrat bahwa pengawasan harus berpedoman terhadap :

1. rencana (planning) yangtelah diputuskan,
2. perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance),
3. tujuan dan atau
4. kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Soekarno (1986) menerangkan : "arti sesungguhnya dari pengendalian atau pengawasan ialah tugas untuk mencocokkan sampai dimanakah program atau rencana yang telah digariskan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apakah telah mencapai hasil yang dikehendaki".Ditambahkan pula bahwa pengawasan atau pengendalian adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.

Soekarno (1986) yang menyatakan bahwa tujuan pengendalian atau pengawasan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan;
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telahditetapkan;

- 3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan serta kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan;
- 4. Untuk mengetahui segala apakah berjalan secara efisien;
- 5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpa, kesulitan-kesulitan, kelemahan kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

2. 1. 1 Prinsip-prinsip pengawasan

Prinsip-prinsip Pengawasan Untuk memungkinkan adanya suatu sistem pengawasan yang efektif dan agar pengawasan itu dapat terarah, maka perlu dipenuhi beberapa, prinsip pengawasan sebagai berikut :

a. Obyektif dan menghasilkan fakta;

Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya;

b. Berpangkal tolak dari

keputusan pimpinan; Untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, yang tercermin dalam :

- 1) Tujuan yang ditetapkan.
- 2) Rencana kerja yang telahditentukan.
- 3) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan.
- 4) Perintah yang telah diberikan.
- 5) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

c. Preventif

Karena pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif,maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan, berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.

d. Bukan tujuan tetapi sarana.

Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuanorganisasi.

e. Efisiensi

Pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

f. Apa yang salah;

Dalam pengawasan janganlah mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya sifat kesalahan itu.

g. Membimbing dan Mendidik;

Manajemen merupakan pengembangan manusia dan benda. Sebagai suatu fungsi manajemen, maka pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik supaya pelaksana atau pegawai meningkatkan kemampuannya dan dedikasinya untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan. Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa pengawasan yang baik harus menggunakan yang dapat dijadikan standar, dan dalam usaha bawahan melaksanakan pekerjaan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh pimpinan, maka instruksi yang diberikan harus jelas dan tegas.

2. 2 Defenisi BANGDAL (Bidang Pengembangan dan Pengendalian)

2. 2.1 Pengembangan

Pengembangan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus. Langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan (Punaji Setyosari, 2013: 222-223).

Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka ~~UNIVERSITAS MEDAN AREA~~ ~~UNIVERSITAS MEDAN AREA~~ mengembangkan suatu dasar

kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri (Iskandar Wiryokusumo dalam Afrilianasari ; 2014)

Pengembangan adalah suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang bersifat internal atau segala upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat tercapai (Gagne dan Bringsdalam Warsita, 2003: 266) Dari beberapa pendapat para ahli yang ada ditarik kesimpulan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana dan terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan dan mendukung serta meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik.

2.2.2 Defenisi Pengendalian

Pengendalian merupakan hal yang sangat penting karena merupakan mata rantai terakhir dalam rangkaian proses manajemen. Dengan pengendalian, dapat diketahui apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Pengendalian diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang telah tercapai, apakah telah sesuai dengan rencana yang dibuat atau melenceng dari rencana yang dibuat tersebut.

Menurut Harold Koontz and Cyrill O'donell dalam buku Nanang Fattah (2007:175) menjelaskan bahwa : "controlling is the measuring and correcting of activities of subordinates to assure that events conform to plants. Atau pengendalian adalah berhubungan dengan pembandingan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang perlu terhadap kejadian-kejadian yang menyimpang dari rencana-rencana". Menurut Sondang P. Siagian masih dalam buku Nanang Fattah (2007:176) Menjelaskan bahwa : "Pengendalian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan".

BAB III

DESKRIPSI LOKASI KKL

3.1 Sejarah Singkat BPPRD

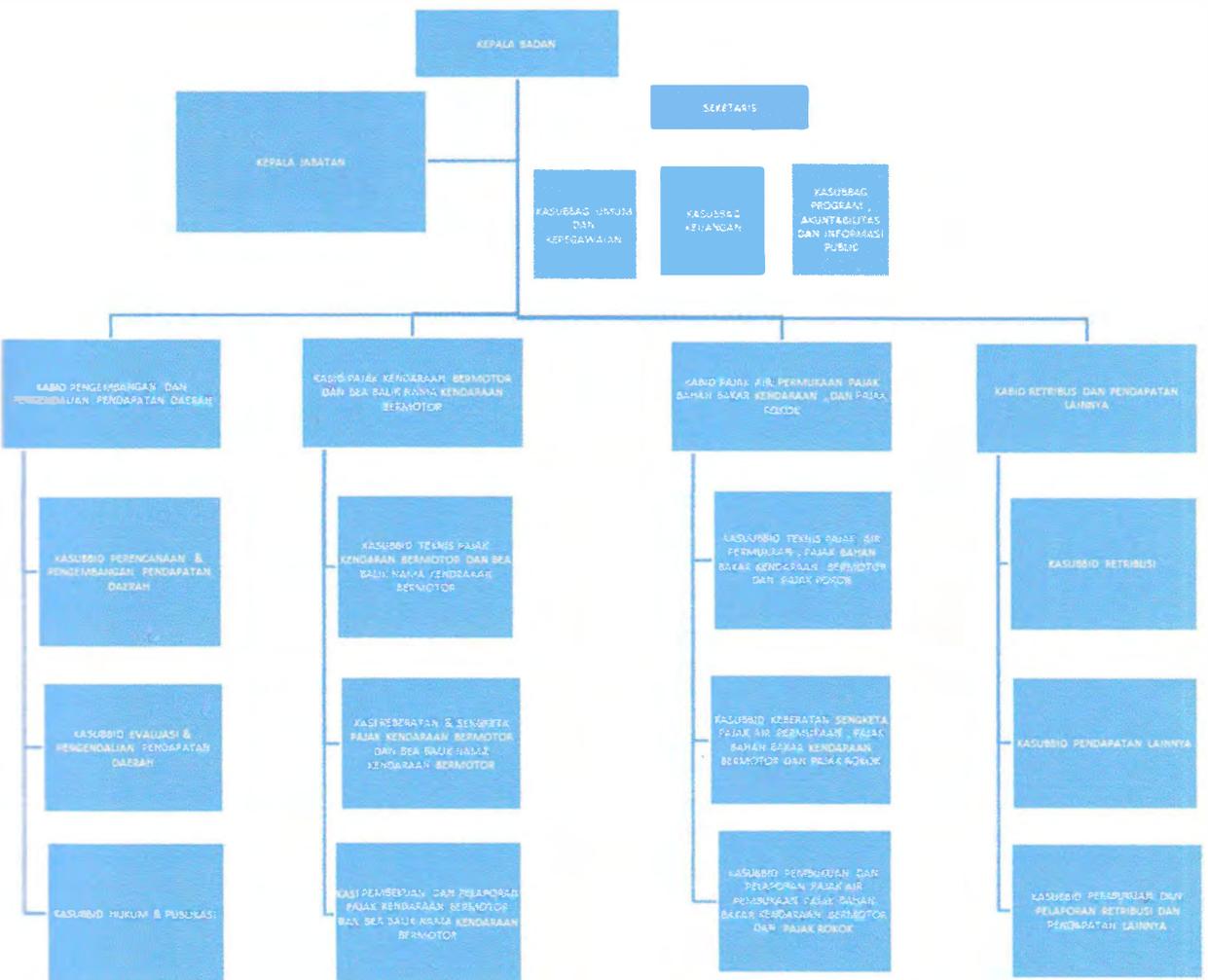
Sejarah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara. Pada mulanya urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi Biro Keuangan (Sekretariat) sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah nomenklatur menjadi Direktorat Keuangan. Sebagai konsekuensi perubahan tersebut maka Bagian Pajak dan Pendapatan mengalami perubahan menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU (sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 7 Nopember 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74), sehingga sejak tanggal 1 April 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Selanjutnya, melalui SK Mendagri No. KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang “Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia”, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Semula pembentukannya dilakukan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU, yang lebih lanjut keberadaannya diperkuat dengan Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 (mulai berlaku tanggal 31 Maret 1976).

Sebagai tindak lanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang Dinas-Dinas sebagai Institusi teknis, yang membantu Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Salah satu Dinas tersebut adalah DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA (DIPENDASU). Mengingat luasnya wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas).

4. 2 Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR BADAN

PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

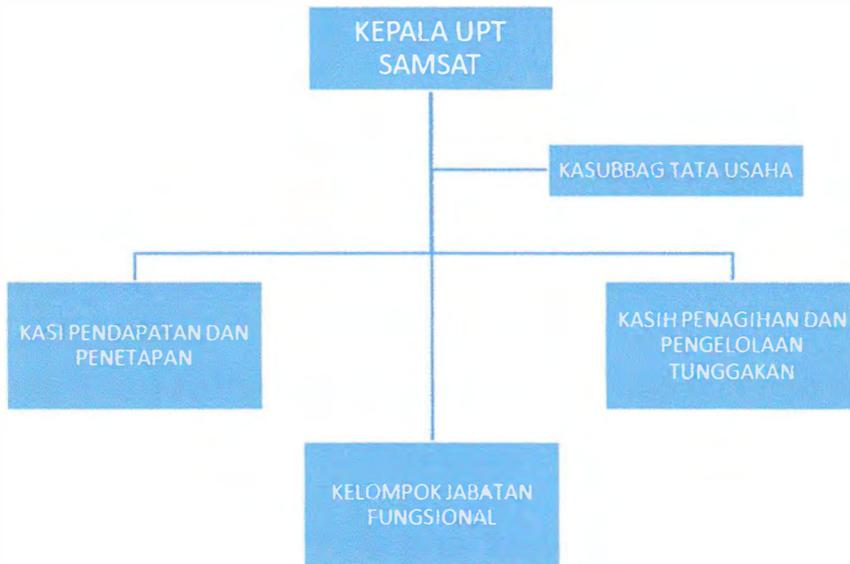


BAGAN ORGANISASI UPT PIP

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PROVINSI SUMATERA UTARA



BAGAN SAMSAT
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PROVINSI
SUMATRA UTARA



Susunan organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Kepala, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Subbidang, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

3. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - c. Sub Bidang Hukum dan Publikasi.

4. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Sub Bidang Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

5. Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknis Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
 - b. Sub Bidang Keberatan Sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.

6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Retribusi;
 - b. Sub Bidang Pendapatan Lainnya;
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya

3 Fasilitas di Kantor Bpprd Sumut

1. Gedung Kantor BPPRD
2. Halaman Parkir
3. Mesin Print out
4. Komputer beserta printernya
5. AC
6. Mesin photocopy
7. wiffee
8. Cap/Stempel
9. Map
10. Meja dan Kursi
11. Lemari
12. Dispenser
13. Gelas ;

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Tugas Dan Fungsi BANGDAL (Bidang Pengembangan dan Pengendalian)

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara; yang kemudian dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara; yang selanjutnya dirinci dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam peraturan tersebut, dinyatakan Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, menyelenggarakan fungsi :

Bidang Bidang BANGDAL Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas :

- a) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengembangan dan Pengendalian;
- b) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, evaluasi dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, hukum dan publikasi;
- c) menyelenggarakan koordinasi pengkajian bahan kebijakan perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, evaluasi dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, hukum dan publikasi;
- d) menyelenggarakan fasilitasi evaluasi, pengendalian dan pembinaan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi kesekretariatan, pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;

- e) menyelenggarakan penyusunan dan penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya;
- f) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengembangan dan pengendalian;

4.2 Kendala Dalam Penerapan Pengawasan di Bangdal (Bidang Pengembangan dan Pengendalian)

Kendala dalam pengawasan internal lebih pada ketidaksiapan auditi Ketika diperiksa. Contohnya dokumen pemeriksaan yang tidak tersedia, pejabat yng diperiksa sedang tidak ditempat, Pns yang akan diperiksa sedang tidak ditempat, Pns yang akan diperiksa tidak cakap dengan bidang tugasnya.

4.3 Dampak dari Keterlambatan BANGDAL Dalam Menjalankan Tugas

Pemeriksaan dilakukan secara reguler, jadi hampir tidak ditemukan keterlambatan. Sifat pemeriksaan juga tidak selalu reguler, apabila diperlukan oleh sesuatu hal akan dilakukan pemeriksaan yang bersifat uji petik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

A. Standar Pengawasan yang diterapkansudah sesuai dengan peraturan pemerintah tentang standar pengawasan, dan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dan telah ditetapkan dengan baik.

B. Kendala Dalam Penerapan Pengawasan di Bangdal (Bidang Pengembangan dan Pengendalian) adalah Kendala dalam pengawasan internal lebih pada ketidaksiapan auditi Ketika diperiksa. Contohnya dokumen pemeriksaan yang tidak tersedia, pejabat yng diperiksa sedang tidak ditempat, Pns yang akan diperiksa sedang tidak ditempat, Pns yang akan diperiksa tidak cakap dengan bidang tugasnya.

C. Dampak dari Keterlambatan BANGDAL Dalam Menjalankan Tugas

Pemeriksaan dilakukan secara reguler, jadi hampir tidak ditemukan keterlambatan. Sifat pemeriksaan juga tidak selalu reguler, apabila diperlukan oleh sesuatu hal akan dilakukan pemeriksaan yang bersifat uji petik.

5.2 Saran

- a. Diharapkan para pegawai lebih ditinggkatkannya kedisiplinan waktu.
- b. Diharapkan untuk para pegawai untuk konsisten jangan memanipulasi waktu , datang hanya formalitas lalu pulang .

DAFTAR PUSTAKA

Sujanto, 1985 beberapa pengertian di bidang pengawasan , cetakan II, ghalia Indonesia, Jakarta.

Suharto 1988, Pelengkap pengawasan melekat Dharma bakhti, Jakarta.

Jurnal RENSTRA-BPPRDSU 2019-1023

Profil BPPRD PROV SUMUT

Dokumentasi Kegiatan KKL



Gambar 1. Foto penyusunan berkas



Gambar 2 . Mengetik surat tentang fraksi



Gambar 3 Menulis Agenda rapat APBD PROVSU



Gambar 4 . Dokumentasi Dengan SEKBAN BPPRD



Gambar 5 . Dokumentasi Dengan SEKBAN BPPRD
UNIVERSITAS MEDAN AREA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN SERBAGUNA NO. 10 HELVETIA
MEDAN

Medan, 20 Juli 2020

Nomor 425/4 / 1104 /BPPRDSU/2020
Sifat Biasa
Lampiran -
Perihal Izin Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

di -

Medan

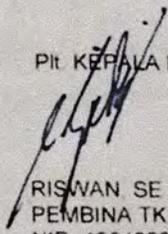
Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 409/FIS.0/05.1/III/2020 tanggal 07 Juli 2020 Perihal Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

No.	Nama	NPM
1	Isak Parlindungan Marulitua Pandiangan	178510018
2	Dosma Saida Novi Yanti Sijabat	178510030
3	Ayu Kristina Situmeang	178510029
4	Gembira Rambe	178510053
5	Pitri Ardiyanti G	178510001

dapat kami terima untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dari tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan selanjutnya.

Pt. KEPALA BADAN


RISWAN, SE
PEMBINA TK I
NIP. 19640501 199303 1 005



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate, Jalan PPSI Nomor 128/0611 7365878, 7360168, 7364348, 7364781, Fax: (061) 7365958 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seteluk Nomor 78 / Jalan Setelur Nomor 10 A, BP (061) 8201994, Fax: (061) 820331 Medan 20122
Website: www.uns.ac.id E-mail: uni_medan@uns.ac.id

Nomor : 409/FIS.0/05.1/VII/2020
Lampiran : -
Hal : Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Medan, 07 July 2020

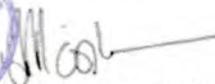
Yth. Bapak/Ibu KANTOR BPPRD SUMUT
Di -
Tempat

Dengan Hormat, Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa/i kami dengan data sebagai berikut :

NO	NAMA MAHASISWA	NPM
1	Isak Parlindungan Marulitua Pandiangan	178510018
2	Dosma Saida Novi Yanti Sijabat	178510030
3	Ayu Kristina Situmeang	178510029
4	Gembira Rambe	178510053
5	Pitri Ardiyanti, G	178510001

Untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dimaksud guna menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa/i, dan KKL dilaksanakan pada tanggal 13 Juli s/d 12 Agustus 2020.

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan KKL pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Beby Masitoh Batubara, S.Sos, MAP



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN SERBAGUNA NO. 10 HELVETIA
MEDAN

LAPORAN AGENDA HARIAN

NAMA : DOSMA SNY SIJABAT

NPM : 178510030

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

INSTANSI KKL : KANTOR BPPRD SUMATRA UTARA

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF KOORDINATOR
1	SENIN 13/07/2020	Perkenalan dengan Pegawai Bangdal	
2	SELASA 14/07/2020	Wawancara dengan kabid Pkl	
3	RABU 15/07/2020	Wawancara dengan salah satu pegawai mengai kinerja bidang Bangdal	
4	KAMIS 16/07/2020	Mangarsip Surat	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

14	SELASA 28/07/2020	Mengagendakan surat masuk	
15	RABU 29/07/2020	Memfotocopy surat peringatan pegawai	
16	KAMIS 30/07/2020	Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk	
17	JUMAT 31/07/2020	Mengumpulkan Laporan Realisasi bulanan	
18	SABTU 01/08/2020	LIBUR	
19	SENIN 03/08/2020	Menulis surat masuk dan surat keluar	
20	SELASA 04/08/2020	Menyusun berkas tentang Fraksi (Partai)	
21	RABU 05/08/2020	Memfotocopy lembar disposisi	
22	KAMIS 06/08/2020	Mendisposisikan surat masuk	

5	JUMAT 17/07/2020	Mengantar berkas ke kantor kepegawaian	
6	SABTU 18/07/2020	LIBUR	
7	SENIN 20/07/2020	Menulis Agenda Rapat APBD	
8	SELASA 21/07/2020	Memfotocopy lembar disposisi	
9	RABU 22/07/2020	Memfotocopy Menomori surat masuk	
10	KAMIS 23/07/2020	Mengarsip surat	
11	JUMAT 24/07/2020	Menyusun agenda	
12	SABTU 25/07/2020	LIBUR	
13	SENIN 27/07/2020	Mengetik surat balasan	

23	JUMAT 07/08/2020	Mengagendakan surat masuk	
24	SABTU 08/08/2020	LIBUR	
25	SENIN 10/08/2020	Membuat surat masuk Dokumentasi dengan Sekban BPPRD	
26	SELASA 11/08/2020	Wawancara lanjutan dengan pegawai bangdal	
27	RABU 12/08/2020	Kegiatan pelepasan Pkl Dokumentasi dengan pegawai Wawancara dengan pegawai Makan Bersama	





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JALAN SERBAGUNA NO. 10 HELVETIA
MEDAN

Daftar Nilai

Telah dilaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Dengan data sebagai berikut :

Nama : Dosma Saida Novi Yanti Sijabat
NPM : 178510030
Periode : 13 Juli 2020 s/d 12 Agustus 2020
Lokasi KKL : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara (BPPRDSU)

Maka dari kegiatan tersebut telah dilakukan penilaian dengan materi meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Nilai
1	Disiplin	95
2	Kerjasama	94
3	Inisiatif	92
4	Sikap Kerja	95
5	Etika Berkomunikasi	94
	Jumlah	470
	Nilai Rata-Rata	94

Demikian penilaian ini dibuat, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP

Medan, 12 Agustus 2020
Pembimbing KKL



DIANA SARAGIH
NIP : 19730609 199703 2 0005